



Dewan Inisiasi Raperda Penanggulangan Kemiskinan

YOGYA (KR) - Tingginya angka kemiskinan masih menjadi persoalan besar yang dihadapi DIY. Angka kemiskinan yang di atas rata nasional dan belum bisa diatasi, mendorong Komisi D DPRD DIY untuk menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan.

"Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Perda ini diharapkan menjadi payung hukum dan acuan semua pemangku kepentingan dalam upaya menanggulangi kemiskinan," kata Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto, Rabu (23/1).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Pemda DIY menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7 persen pada 2022. Meski berbagai upaya dilakukan Pemda DIY melalui serangkaian program kegiatan, angka kemiskinan saat ini masih di kisaran 12 persen.

"Progress penurunan angka kemiskinan sangat lambat, hanya berkisar 0,6% setiap tahunnya. Kalau tidak langkah strategis dan komprehensif, target 7 persen sulit terealisasi," ujar Koeswanto.

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, salah satu faktor mengapa angka kemiskinan sulit diturunkan

adalah perbedaan perspektif dan rumusan mengenai kemiskinan. Beberapa parameter kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) kurang mencerminkan kondisi riil di DIY.

Koeswanto mencontohkan jumlah nominal yang dikeluarkan untuk belanja dan konsumsi kalori sebagai ukuran kemiskinan. Parameter itu tidak cocok untuk DIY, karena banyak warga yang hidup bersahaja namun memiliki aset.

"Parameter-parameter itu perlu dievaluasi, dan perspektif mengenai kemiskinan harus bisa disinkronkan. Kalau sudah satu perspektif, program dan kegiatan penanggulan-

gan kemiskinan bisa signifikan hasilnya," terangnya.

Menurut anggota Badan Pembentukan Perda/Perdais (Bapemperda) DPRD DIY, Suharwanta, Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan akan dibahas dalam Triwulan I 2019. Saat ini draf Raperda tersebut tengah dikaji Bapemperda untuk dilakukan pembenahan substansial.

"Dalam Raperda akan dituangkan program-program yang akan dilaksanakan, dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan yang terukur. Ini akan jadi acuan agar semua pihak bisa dilibatkan secara terkoordinasi untuk penanggulangan kemiskinan," katanya. (Bro)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005